

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan tentang Perilaku Politik

#### 1. Pengertian Perilaku Politik

Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antar lembaga pemerintah dan antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik (Kristiadi, 2006: 28).

Sejalan dengan pengertian politik, perilaku politik berkenaan dengan tujuan suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat kearah pencapaian tujuan tersebut. Beberapa negara berkembang sering dihadapkan dengan masalah integrasi nasional yang menjadi tantangan dalam pembangunan sistem politik di negara tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari dua dimensi, yakni:

- a) Dimensi *horizontal*, yaitu terdapat perbedaan suku, ras, agama, golongan dan lain-lain yang dipengaruhi oleh ikatan primordial yang hidup dalam norma-norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat yang secara tidak langsung dapat menghambat perkembangan proses integrasi nasional.

- b) Dimensi *vertikal*, yaitu berupa masalah yang muncul dan memicu terjadinya jurang pemisah (gap) antara kalangan elit yang eksekutif dengan kelompok mayoritas (massa). Stratifikasi sosial yang terjadi menimbulkan rasa keterasingan masyarakat dari kalangan elit yang sedang berkuasa (Kristiadi, 2006: 34)

Perilaku politik dapat diartikan sebagai keseluruhan tingkah laku politik para aktor politik dan warga negara yang dalam manifestasi konkretnya telah saling memiliki hubungan dengan kultur politik. Sikap warga negara, respon dan aktivitasnya terhadap sistem politik yang berlaku dipengaruhi oleh budaya politik yang membentuknya (Huntington, 2010: 42).

Perilaku politik (*political behavior*) dinyatakan sebagai suatu telaah mengenai tindakan manusia dalam situasi politik. Perilaku politik juga sering dikaitkan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Adapun yang melakukan kegiatan politik adalah pemerintah dan masyarakat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pada hakikatnya seorang individu atau masyarakat setelah memiliki sikap politik terhadap suatu objek politik sebagai manifestasi nyata dari sikap politik yang merupakan sikap alami yang terdapat pada setiap individu. Melakukan tindakan atau aktivitas politik lalu tindakan ini yang kemudian disebut sebagai perilaku politik (Efriza, 2012: 25).

Berdasarkan beberapa definisi perilaku politik menurut para ahli tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perilaku politik merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat berkaitan dengan

tujuan suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat kearah pencapaian tujuan tersebut.

## **2. Pembagian Perilaku Politik**

Pelaksanaan pemilu di suatu Negara ataupun dalam pelaksanaan pilkada langsung di suatu daerah, perilaku politik dapat berupa perilaku masyarakat dalam menentukan sikap dan pilihan dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada tersebut hal ini jugalah yang membuat digunakannya teori perilaku politik dalam proposal penelitian ini Perilaku politik dapat dibagi dua sebagai berikut:

- a. Perilaku politik lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintah, yakni bertanggung jawab membuat, melaksanakan dan menegakkan keputusan politik.
- b. Perilaku politik warga Negara biasa (baik individu maupun kelompok), yakni berhak mempengaruhi pihak yang pertama dalam melaksanakan fungsinya karena apa yang dilakukan pihak pertama menyangkut kehidupan pihak kedua. Kegiatan politik yang dilakukan oleh warga Negara biasa (individu maupun kelompok) disebut partisipasi politik (Rahman, 2007: 29).

Menurut Mahendra (2005: 36) menjelaskan bahwa kajian terhadap perilaku politik, dapat dipilih tiga unit analisis yaitu :

- 1). Aktor politik (meliputi aktor politik, aktivitas politik, dan individu warga negara biasa).

- 2). Agregasi politik (yaitu individu aktor politik secara kolektif seperti partai politik, birokrasi, lembaga-lembaga pemerintahan).
- 3). Topologi Kepribadian Politik (yaitu kepribadian pemimpin, seperti Otoriter, *Machiavelist*, dan Demokrat).

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik aktor politik (pemimpin, aktivis, dan warga biasa) antara lain:

- a). Lingkungan sosial politik tak langsung seperti sistem politik, ekonomi, budaya dan media massa.
- b). Lingkungan sosial politik langsung yang membentuk kepribadian aktor seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok bergaul. Dari lingkungan ini, seorang aktor politik mengalami proses sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat dan norma kehidupan bernegara.
- c). Struktur kepribadian. Hal ini tercermin dalam sikap individu (yang berbasis pada kepentingan, penyesuaian diri dan eksternalisasi).
- d). Lingkungan sosial politik langsung berupa situasi yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuknya (Mahendra, 2005: 41).

## **B. Tinjauan tentang Partisipasi Politik**

### **1. Pengertian Partisipasi Politik**

Keikutsertaan Warga Negara atau masyarakat dalam suatu kegiatan politik, tidak terlepas dengan adanya partisipasi politik dari masyarakat. Masyarakat merupakan faktor terpenting dalam menentukan pemimpin pemerintahan, baik di tingkat pusat sampai pada tingkat terendah yakni desa. Menurut Budiardjo (2008: 19) menjelaskan bahwa:

“Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama”.

Berdasarkan teori tersebut partisipasi merupakan faktor terpenting dalam setiap sikap yang dilakukan oleh seseorang atau individu baik dalam suatu organisasi, yang pada akhirnya dapat mendorong seseorang tersebut mencapai tujuan yang akan dicapai oleh organisasinya dan mempunyai tanggungjawab bersama dari setiap tujuan tersebut.

Selain itu Ramlan Surbakti dalam Budiardjo (2008: 26) memberikan definisi bahwa:

“Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik”.

Berdasarkan teori di atas, dapat dikatakan bahwa partisipasi merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu pelaksanaan demokrasi. Dimana pelaksanaan demokrasi dapat menentukan keputusan politik yang akan dibuat dan dilaksanakan pemerintah serta dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Menurut Usman dalam Budiardjo (2008: 32) partisipasi adalah partisipasi itu dapat bersifat perorangan atau secara kelompok, diorganisasikan atau secara spontan, ditopang atau sporadis, secara baik-baik atau dengan kekerasan, legal atau tidak legal, aktif atau tidak aktif. Partisipasi pada umumnya bersifat perorangan atau kelompok yang dibentuk dalam suatu organisasi secara baik-baik tanpa adanya kekerasan dalam bentuk apapun. Pelaksanaan partisipasi dari Warga Negara atau masyarakat dalam salah satu contoh keputusan yang

dibuat oleh pemerintah yakni pemilihan umum di tingkat pusat dan di tingkat desa.

Pemilihan umum tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak adanya partisipasi politik dari masyarakat. Definisi partisipasi politik itu sendiri menurut Nelson bahwa Partiasipasi politik adalah Kegiatan warga Negara sipil (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah (Budiardjo, 2008: 48).

Partisipasi politik menurut Hilman dalam Budiardjo (2008: 53) yaitu:

“Partisipasi politik adalah Kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*)”.

Berdasarkan teori di atas, kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang ikut aktif dalam politik dengan memilih pemimpin Negara baik secara langsung maupun tidak langsung sangat mempengaruhi semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga seseorang atau sekelompok orang yang aktif tersebut merupakan faktor terpenting dari semua kegiatan politik dalam menentukan pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan.

Menurut Soemarsono dalam Budiardjo (2008: 59) menjelaskan bahwa:

“Partisipasi politik pada hakekatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus langkah-langkahnya) ke dalam simbol-simbol pribadi. Atau dengan perkataan lain, partisipasi politik adalah proses memformulasikan ulang simbol-simbol-simbol komunikasi berdasarkan tingkat rujukan yang dimiliki baik secara pribadi maupun secara kelompok (*individual reference, social references*) yang berwujud dalam aktivitas sikap dan prilaku”.

Berdasarkan teori di atas bahwa formulasi simbol-simbol merupakan faktor terpenting dalam komunikasi baik dilihat secara pribadi maupun secara kelompok. Sedangkan menurut Michael Rush dan Philip Althoff dalam Budiardjo (2008: 64) bahwa:

“Partisipasi politik merupakan keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Yang termasuk dalam sistem politik tersebut antara lain: Menduduki jabatan politik atau administratif, Mencari jabatan politik atau administrasi, Keanggotaan aktif suatu organisasi politik, Keanggotaan pasif suatu organisasi politik, Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik, Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik, Partisipasi dalam rapat umum, kampanye, dan sebagainya, Partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam politik, Voting atau Pemberian Suara”.

Berdasarkan teori di atas, keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam semua sistem politik, yang berupa hierarki partisipasi yang dapat dilihat dalam menduduki jabatan politik, mencari jabatan politik, ikut menjadi anggota aktif suatu organisasi, menjadi anggota pasif suatu organisasi politik, ikut dalam rapat umum, ikut dalam diskusi politik maupun pemberian suara saat pemilihan baik pemilihan umum di tingkat pusat maupun pemilihan umum di tingkat pemerintahan terkecil yaitu desa.

Sementara itu menurut Rafael Raga dalam Budiardjo (2008: 70) bahwa:

“Partisipasi politik sebagai usaha yang terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalanya kebijaksanaan umum. Usaha ini dilakukan berdasarkan kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu negara. Dalam hal ini, partisipasi politik berbeda dengan mobilisasi politik, yaitu usaha pengerahan masa oleh golongan elite politik untuk mendukung kepentingan-kepentingannya”.

Berdasarkan teori di atas, partisipasi politik sebagai usaha yang terorganisir atau tersusun rapi oleh warga negara atau masyarakat dalam memilih semua

pemimpin-pemimpin yang akan menduduki pemerintahan serta dapat berpengaruh pada semua kebijaksanaan umum. Dalam hal ini partisipasi politik bukan merupakan mobilisasi politik yang dapat menggerakkan masyarakat yang diinginkan para elit politik, sehingga dapat mendukung semua keinginan-keinginan dari para elit politik tersebut.

Menurut Kevin R. Hardwick dalam Budiardjo (2008: 77) menjelaskan bahwa:

*“Political participation concerns the manner in which citizen interact with government, citizens attempt to convey their needs to public officials in the hope of having these needs met”*(Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga Negara berinteraksi dengan pemerintah, warga Negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut).

Berdasarkan teori di atas, partisipasi politik merupakan usaha dari Warga Negara untuk mempengaruhi pemimpin pemerintahan serta adanya interaksi warga negara dengan pemerintah dalam menyampaikan semua kepentingan atau keinginan yang dibutuhkan oleh warga negara yang disampaikan pada pemerintah, sehingga kepentingan atau keinginan tersebut dapat terlaksana.

Setiap masyarakat yang sudah tinggal dan menetap di Indonesia serta sudah terdaftar menjadi warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk berpartisipasi politik di negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, maupun golongan tanpa terkecuali dimaksudkan dalam penelitian ini ialah etnis Tionghoa. Melihat dari partisipasi politik etnis Tionghoa dari zaman ke zaman yang selalu berubah-ubah, sampai dimana era saat ini partisipasi maupun peran etnis Tionghoa diakui keberadaannya di negara Indonesia.

Warga etnis Tionghoa saat ini semakin menunjukkan eksistensinya dalam berpartisipasi politik, seperti salah satu contohnya ikut memilih dalam suatu pemilihan umum, baik itu pemilihan Presiden maupun pemilihan kepala daerah. Ada berbagai macam faktor maupun alasan mengapa para warga etnis Tionghoa ikut serta dalam suatu pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, faktor maupun alasan yang paling mendasar untuk dijelaskan mungkin karena mereka merasa walaupun mereka warga keturunan bukan merupakan asli Indonesia, namun setelah sekian lama mereka dan menetap dan akhirnya menjadi WNI memiliki identitas yang sama dengan Warga Negara Indonesia yang lainnya.

Melihat dari kesamaan identitas dengan warga lainnya hal itulah yang meyakinkan bahwa etnis Tionghoa mempunyai hak dan kewajiban sama dalam partisipasi politik, serta menimbulkan kesadaran politik ditengah-tengah masyarakat etnis Tionghoa sebagai rasa tanggung jawab mereka sebagai warga negara Indonesia dalam hal partisipasi politik dalam hal ini ikut memberikan hak suaranya dalam suatu pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

Menurut Myron Weiner dalam Gaffar (2002: 45) paling tidak terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik ini antara lain:

- a). Modernisasi, komersialisasi pertanian, industrialisasi, urbanisasi yang meningkat, penyebaran kepandaian baca tulis, perbaikan pendidikan, dan pengembangan media komunikasi massa. Ketika penduduk kota baru yang buruh, pedagang mempengaruhi nasib mereka sendiri, mereka makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.

- b). Perubahan-perubahan Struktur Kelas Sosial, begitu bentuk suatu kelas pekerja baru dan kelas menengah yang meluas dan berubah selama proses industrialisasi dan modernisasi, masalah tentang siapa yang berhak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik.
- c). Pengaruh kaum Intelektual dan Komunikasi massa Modern; kaum intelektual, sarjana, filosof, pengarang dan wartawan sering mengemukakan ide-ide seperti egalitarisme dan nasionalisme kepada masyarakat umum untuk membangkitkan tuntutan akan partisipasi massa yang luas dalam pembuatan keputusan politik.
- d). Konflik di antara Kelompok-Kelompok pemimpin politik; kalau timbul kompetisi memperebutkan kekuasaan, strategi yang biasa digunakan oleh kelompok-kelompok yang saling berhadapan adalah mencari dukungan rakyat.
- e). Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial ekonomi dan kebudayaan; perluasan kegiatan pemerintah dalam bidang-bidang kebijaksanaan baru biasanya berarti bahwa konsekuensi tindakan-tindakan pemerintahan menjadi semakin menyusup ke segala segi kehidupan sehari-hari rakyat. Tanpa hak-hak sah atas partisipasi politik, individu-individu betul-betul tidak berdaya menghadapi dan dengan mudah dapat dipengaruhi oleh tindakan-tindakan pemerintah yang mungkin dapat ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

## **2. Kategorisasi Partisipasi Politik**

Secara umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik. Negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu, tingginya tingkat partisipasi juga menunjukkan bahwa rezim yang sedang berkuasa memiliki keabsahan yang tinggi, dan sebaliknya rendahnya partisipasi politik di suatu Negara dianggap kurang baik karena menunjukkan rendahnya perhatian warga terhadap

masalah politik, selain itu rendahnya partisipasi politik juga menunjukkan lemahnya legitimasi dari rezim yang sedang berkuasa (Rahman, 2007: 34).

Partisipasi sebagai suatu bentuk kegiatan dibedakan atas dua bagian, yaitu:

- a. *Partisipasi aktif*, yaitu kegiatan yang berorientasi pada output dan input politik. Yang termasuk dalam partisipasi aktif adalah, mengajukan usul mengenai suatu kebijakan yang dibuat pemerintah, menagjukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan.
- b. *Partisipasi pasif*, yaitu kegiatan yang hanya berorientasi pada output politik. Pada masyarakat yang termasuk kedalam jenis partisipasi ini hanya menuruti segala kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa mengajukan kritik dan usulan perbaikan (Mahendra, 2005: 62).

Kemudian terdapat masyarakat yang tidak termasuk kedalam kedua kategori ini, yaitu masyarakat yang menganggap telah terjadinya penyimpangan sistem politik dari apa yang telah mereka cita-citakan. Kelompok tersebut disebut apatis (golput). Kategori partisipasi politik menurut *Milbrath* dalam *Huntington* (2010: 57) adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan *Gladiator* meliputi:
  - a. Memegang jabatan publik atau partai
  - b. Menjadi calon pejabat
  - c. Menghimpun dana politik
  - d. Menjadi anggota aktif suatu partai
  - e. Menyisihkan waktu untuk kampanye politik.
2. Kegiatan transisi meliputi :
  - a. Mengikuti rapat atau pawai politik
  - b. Memberi dukungan dana partai atau calon
  - c. Jumpa pejabat publik atau pemimpin politik

3. Kegiatan *monoton* meliputi :
  - a. Memakai symbol atau identitas partai atau organisasi politik
  - b. Mengajak orang untuk memilih
  - c. Menyelenggarakan diskusi politik
  - d. Memberi suara
4. Kegiatan apatis atau masa bodoh.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang adalah :

- a. Kesadaran politik, yaitu kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.
- b. Kepercayaan politik, yaitu sikap dan kepercayaan orang tersebut terhadap pemimpinnya (Huntington, 2010: 58).

Berdasarkan dua faktor tersebut, terdapat empat tipe partisipasi politik yaitu:

- 1). Partisipasi politik aktif jika memiliki kesadaran dan kepercayaan politik yang tinggi.
- 2). Partisipasi politik apatis jika memiliki kesadaran dan kepercayaan politik yang rendah.
- 3). Partisipasi politik pasif jika memiliki kesadaran politik rendah, sedangkan kepercayaan politiknya tinggi.
- 4). Partisipasi politik militant radikal jika memiliki kesadaran politik tinggi, sedangkan kepercayaan politiknya rendah (Huntington, 2010: 59).

### **C. Tinjauan tentang Perilaku Pemilih**

Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para konsestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada konsestan yang bersangkutan.

Masyarakat merupakan faktor terpenting dalam Pemilihan Umum menentukan pemimpin pemerintahan baik (Nursal, 2004: 13).

Menurut Firmanzah dalam Nursal (2004: 15) menyatakan bahwa:

“Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen atau masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian dimanifestasikan dalam institusi politik seperti parpol”.

Menurut Jean Kristiadi (2006: 76) menyatakan bahwa:

“Perilaku seseorang untuk memberikan suara dalam proses pemilihan umum berdasarkan faktor psikologis, faktor sosiologis, dan faktor rasional pemilih atau disebut teori *voting behavioral*. Perilaku memilih merupakan tindakan seseorang ikut serta dalam memilih orang, partai politik, atau isu publik tertentu yang sedang terjadi. Salah satu wujud dari partisipasi politik ialah kegiatan pemilihan yang mencakup dukungan suara, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil proses pemilihan”.

Menurut Surbakti dalam Nursal (2004: 19) perilaku pemilih adalah aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih dan tidak memilih (*to vote or not to vote*) di dalam suatu pemilu maka *voters* akan memilih atau mendukung kandidat tertentu”.

Perilaku pemilih Menurut Surbakti ditentukan oleh lima domain kognitif yang berbeda dan terpisah sebagai berikut:

- a) Isu dan kebijakan publik (*issues and policies*), mempresentasikan kebijakan/program (*platform*) yang diperjuangkan dan dijanjikan oleh partai atau kandidat politik jika kelak menang Pemilu.
- b) Citra sosial (*social imagery*), menunjukkan stereotip kandidat atau partai politik untuk menarik pemilih dengan menciptakan asosiasi antara kandidat atau partai dan segmen-segmen tertentu dalam masyarakat. Citra sosial bisa terjadi berdasarkan banyak faktor, antara lain demografi, sosial ekonomi, kultur dan etnik, serta politis-ideologis.

- c) Perasaan emosional (*emotional feelings*) adalah dimensi emosional yang terpancar dari sebuah kontestan atau kandidat yang ditunjukkan oleh kebijakan politik yang ditawarkan.
- d) Peristiwa mutakhir (*currents events*) mengacu pada peristiwa, isu, dan kebijakan yang berkembang menjelang dan selama kampanye.
- e) Faktor epidemik (*episdemic issues*) adalah isu-isu pemilihan yang spesifik yang dapat memicu keingintahuan para pemilih mengenai hal-hal baru.

Menurut Firmanzah dalam Nursal (2004: 26) ada tiga faktor determinan bagi pemilih dalam memutuskan pilihan politiknya. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi pertimbangan pemilih, yaitu:

*Pertama*, Kondisi awal pemilih. Kondisi awal yang dimaksud adalah karakteristik yang akrab dengan diri pemilih. Setiap individu memiliki nilai, keyakinan dan kepercayaan dengan tingkatan yang berbeda-beda. Setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda, tergantung pada tingkat pengalaman, pendidikan, ekonomi, dan status sosial masing-masing. Kondisi ini jelas sangat mempengaruhi individu dalam pengambilan keputusan politik. *Kedua*, faktor media massa yang mempengaruhi opini publik. Media masa yang memuat data, informasi, dan berita berperan penting dalam mempengaruhi opini di masyarakat. Demikian pula dengan pemaparan para ahli, iklan politik, hasil seminar, survei dan berbagai hal yang diulas dalam media masa akan menjadi bahan pertimbangan pemilih. Isu-isu hangat dan aktual, perkembangan situasi dan berita-berita terkait kinerja dan *platform* partai akan dikonsumsi oleh pemilih dengan keragaman dan derajat pemahaman yang berbeda-beda. *Ketiga*, faktor parpol atau kontestan. Pemilih akan menilai latar belakang, reputasi, citra, ideologi, dan kualitas para tokoh-tokoh parpol dengan pandangan mereka masing-masing.

Masyarakat akan menilai kinerja partai dalam kurun waktu yang cukup lama, jauh dari sebelum pemilu dilaksanakan. Parpol atau kontestan pemilu yang ingin mendapat citra baik di tengah-tengah masyarakat harus membuktikannya dari jauh-jauh hari sebelum pemilu berlangsung. Reputasi harus dibangun tidak dengan jangka waktu yang sebentar dan merupakan hasil dari akumulasi serta kinerja dalam kurun waktu yang relatif lama. Karena untuk mendapatkan

suatu hasil memerlukan proses yang panjang, melihat kondisi masyarakat yang fluktuatif perilakunya dalam menanggapi pemilihan umum.

Menurut Jean Kristiadi (2006: 41) teorinya mengungkapkan, ada beberapa pendekatan untuk menganalisis tingkah laku masa pemilih dalam suatu pemilu meliputi: pendekatan struktural, pendekatan sosiologis, pendekatan ekologis, pendekatan psikologis-sosial dan pendekatan rasional.

Menurut oleh Samuel P. Huntington (2010: 59) pemilih dikelompokkan menjadi empat segmen berdasarkan perilaku pemilih sebagai bagian dari *political marketing* antara lain:

- a) *Segmen pemilih rasional*. Kelompok pemilih yang memfokuskan perhatian pada isu dan kebijakan kontestan dalam menentukan pilihan politiknya.
- b) *Segmen pemilih emosional*. Kelompok pemilih yang dipengaruhi oleh perasaan-perasaan tertentu dalam menentukan pilihan politiknya. Faktor emosional ini sangat ditentukan oleh faktor personalitas kandidat.
- c) *Segmen pemilih sosial*. Kelompok yang mengasosiasikan kontestan pemilu dengan kelompok-kelompok sosial tertentu dalam menentukan pilihan politiknya.
- d) *Segmen pemilih situasional*. Kelompok pemilih yang dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional tertentu dalam menentukan pilihannya. Segmen ini digerakkan oleh perubahan dan akan menggeser pilihan politiknya jika terjadinya kondisi-kondisi tertentu.

Perilaku memilih seseorang sangat ditentukan oleh kinerja dan pencapaian sebuah partai politik atau kontestan politik jauh sebelum mereka berkampanye untuk pemilu. Berdasarkan beberapa pendapat yang telah diungkapkan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku pemilih adalah tindakan seseorang untuk memberikan suara dalam pemilihan umum, yang diperhatikan

dalam hal ini adalah mengapa seseorang memilih partai tertentu, tokoh tertentu dan pengelompokan tertentu.

#### **D. Teori-teori Pendekatan Perilaku Pemilih**

Pemilih merupakan komponen penting dalam pemilihan umum. Hal tersebut dikarenakan sistem politik demokrasi yang meletakkan kedaulatan tertinggi pada rakyat. Rakyat berhak mencalonkan dan memilih siapa yang akan mewakili kontestan di kursi parlemen. Perilaku pemilih juga sarat dengan *ideology* antara pemilih dengan partai politik atau kontestan pemilu. Masing-masing kontestan membawa ideologi yang saling berinteraksi. Selama periode kampanye pemilu, muncul kristalisasi dan pengelompokan antara ideologi yang dibawa kontestan. Masyarakat akan mengelompokkan dirinya kepada kontestan yang memiliki ideologi sama dibawa dengan yang mereka anut sekaligus juga menjauhkan diri dari ideologi yang berseberangan dengan mereka.

Menurut teori Surbakti dalam Nursal (2004: 33) ada beberapa pendekatan untuk melihat perilaku pemilih, yaitu:

- 1) Pendekatan sosiologis.
- 2) Pendekatan Psikologis.
- 3) Pendekatan Rasional.
- 4) Pendekatan Domain Kognitif.

Berdasarkan beberapa rumusan beberapa pendekatan untuk melihat perilaku pemilih oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pendekatan tersebut hanya berkisar pada tiga pendekatan sebagaimana yang dirumuskan

oleh Surbakti dalam Nursal (2004: 33), maka pendekatan untuk melihat perilaku pemilih dalam teori Surbakti dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Sosiologis**

Menurut Surbakti dalam Nursal (2004: 34), ketika menggunakan pendekatan ini untuk menjelaskan perilaku memilih masyarakat Inggris, menyebut model ini sebagai *social determinism approach*. Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih seseorang. Karakteristik sosial (seperti pekerjaan, pendidikan dan sebagainya) dan karakteristik atau latar belakang sosiologis (seperti agama, wilayah, jenis kelamin, umur dan sebagainya) merupakan faktor penting dalam menentukan pilihan politik.

Pengelompokan sosial seperti umur (tua atau muda); jenis kelamin (laki-laki atau perempuan); agama dan sebagainya dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi-organisasi keagamaan, organisasi-organisasi profesi; maupun pengelompokan informal seperti keluarga, pertemanan, atau pun kelompok-kelompok kecil lainnya., merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memahami perilaku politik seseorang, karena kelompok-kelompok inilah yang mempunyai peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang.

Menurut mazhab Asfar dalam Mahendra (2005: 75), pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial, usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang keluarga, dan sebagainya dianggap memberi pengaruh cukup signifikan dalam membentuk perilaku pemilih.

Menurut teori Surbakti dalam Nursal (2004: 37-41) teori perilaku pemilih sosiologis atau mazhab Columbia menekankan bahwa faktor-faktor sosiologis memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku memilih seseorang atau sekelompok orang, perilaku pemilih dalam pendekatan sosiologis dipengaruhi oleh beberapa indikator, yaitu:

- a) Tingkat pendidikan sosial pemilih.
- b) Karakteristik sosial pemilih berdasarkan pekerjaan.
- c) Pendapatan pemilih.
- d) Karakteristik kelompok umur dan jenis kelamin pemilih.
- e) Karakteristik sosial didasarkan suku pemilih.
- f) Karakteristik sosial pemilih berdasarkan unsur lingkungan keluarga atau kelas sosial.

Mengenai mazhab sosiologis, Marbawi (*Litbang Media Group*), seperti yang dikutip oleh Mahendra (2005: 75), menyatakan bahwa:

“Latar belakang pilihan atas partai, calon dan isu, ditentukan oleh karakteristik sosial pemilih. Misalnya, agama, etnis, atau kedaerahan. Seseorang akan memilih partai atau figur tertentu, karena ada kesamaan karakteristik sosial antara si pemilih dan karakteristik sosial figur atau partai”.

Menurut Muhammad Asfar dalam Nursal (2004: 43) menjelaskan bahwa:

“Pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih. Pengelompokan sosial seperti umur (tua, muda) jenis kelamin, agama dan

semacamnya, dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku pemilih”.

Latar belakang pilihan atas partai atau calon, menurut pendekatan sosiologis dikembangkan dari asumsi bahwa perilaku memilih ditentukan oleh karakteristik sosial pemilih. Misalnya, agama, etnik, atau kedaerahan. Seseorang akan memilih partai atau figur tertentu, karena ada kesamaan karakteristik sosial antara si pemilih dan karakteristik sosial figur atau partai.

## **2. Pendekatan Psikologis**

Pendekatan psikologis menurut Surbakti dalam Nursal (2004: 47), yakni pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi-terutama konsep sosialisasi dan sikap untuk menjelaskan perilaku pemilih. Variabel-variabel itu tidak dapat dihubungkan dengan perilaku memilih kalau ada proses sosialisasi. Oleh karena itu, menurut pendekatan ini sosialisasilah sebenarnya yang menentukan perilaku memilih (politik) seseorang.

Pendekatan ini menjelaskan sikap seseorang-sebagai refleksi dari kepribadian seseorang-merupakan variabel yang cukup menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Oleh karena itu, pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat.

Pendekatan psikologis menurut Mahendra (2005: 80) mengungkapkan bahwa:

“masyarakat dalam menentukan pilihannya dalam suatu proses pemilu lebih banyak dipengaruhi oleh kekuatan psikologis yang berkembang

dalam dirinya sendiri. Model psikologis menggunakan identifikasi partai sebagai konsep kunci. Identifikasi partai berarti “rasa keterkaitan individu terhadap partai”, sekalipun bukan anggota partai”.

Menurut Angus Campbell dalam Nursal (2004: 51) menyatakan bahwa:

*“a psychological identification, which can persist without legal recognition or evidence of formal membership and even without a consistent record of party support”*. (identifikasi psikologis, yang dapat tetap melakukan tanpa pengakuan yang sah atau bukti keanggotaan formal dan sekalipun tanpa data yang tetap tentang pendukung partai).

Sikap seseorang sangat mempengaruhi perilaku politiknya, yang semuanya itu merupakan akibat dari hasil proses sosialisasi yang panjang. Melalui proses sosialisasi inilah, akan berkembang suatu ikatan yang kuat dengan partai politik atau organisasi masyarakat lainnya. Ikatan seperti inilah yang disebut sebagai identifikasi partai sebuah variabel inti untuk menjelaskan pemilih berdasarkan Mazhab Michigan.

### **3. Pendekatan Rasional**

Pendekatan rasional menurut Surbakti dalam Nursal (2004: 59), bahwa perilaku pemilih oleh pakar politik sebenarnya diadaptasi dari ilmu ekonomi. Para ahli politik melihat adanya analogi antara pasar (ekonomi) dan perilaku memilih (politik), apabila secara ekonomi masyarakat dapat bertindak secara rasional, yaitu menekan ongkos sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka dalam perilaku politik pun maka masyarakat akan dapat bertindak secara rasional, yakni memberikan suara ke OPP yang dianggap mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan menekan kerugian.

Pendekatan rasional muncul sebagai reaksi terhadap dua pendekatan terdahulu yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis. Pendekatan ini lahir untuk menjelaskan tentang pergeseran perilaku pemilih dari satu pemilu ke pemilu yang lain, dari orang sama dengan status sosial yang sama, yang tidak dapat dijelaskan oleh dua pendekatan sebelumnya.

Menurut Lawrence, atau Redlawsk, ataupun Roth dalam Nursal (2004: 61) berdasarkan pendekatan ini, manusia diasumsikan adalah seorang pemilih yang rasional. Individu mengantisipasi setiap konsekuensi yang mungkin muncul dari pilihan-pilihan yang ada. Lalu, dari pilihan-pilihan tersebut, individu akan memilih pilihan yang memberi keuntungan paling besar bagi dirinya.

Pendekatan rasional berkaitan dengan pola perilaku pemilih masyarakat, yakni orientasi isu dan orientasi kandidat. Orientasi isu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sosial, ekonomi dan politik tertentu yang kontekstual dengan pemilu bersangkutan terutama peristiwa dramatis. Sementara itu pendekatan rasional terhadap kandidat dapat didasarkan pada kedudukan informasi, prestasi dan popularitas pribadi bersangkutan dalam berbagai bidang kehidupan seperti organisasi, kesenian, olahraga dan politik. Pendekatan rasional mengantarkan pada kesimpulan, bahwa para pemilih benar-benar rasional, para pemilih melakukan penilaian yang valid terhadap tawaran partai.

Berdasarkan tindakan komunikasi, Nimmo dalam Nursal (2004: 65) menggolongkan pemilih ini sebagai pemberi suara yang rasional. Pemilih

rasional itu memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan dan mendapat informasi yang cukup, tindakan mereka bukanlah karena faktor kebetulan atau kebiasaan, bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk kepentingan umum menurut pikiran dan pertimbangan logis.

#### **4. Pendekatan Domain Kognitif**

Pendekatan domain kognitif menurut Surbakti dalam Nursal (2004: 70) yakni model perilaku pemilih berdasarkan beberapa domain yang terkait dengan marketing. Dalam mengembangkan model tersebut menggunakan sejumlah kepercayaan kognitif yang berasal dari berbagai sumber seperti pemilih, komunikasi dari mulut ke mulut, dan media massa. Model ini dikembangkan untuk menerangkan dan memprediksikan perilaku pemilih. Menurut model ini, perilaku pemilih ditentukan oleh lima domain kognitif yang berbeda dan terpisah, sebagai berikut:

- a) Isu dan kebijakan politik  
Merepresentasikan kebijakan atau program yang diperjuangkan dan dijanjikan oleh partai atau kandidat politik jika kelak menang pemilu.
- b) Citra sosial (*social imagery*)  
*Social imagery* adalah citra kandidat dalam pikiran pemilih mengenai berada di dalam kelompok sosial mana atau tergolong sebagai apa seorang kandidat politik.
- c) Perasaan emosional  
Perasaan emosional adalah dimensi yang terpancar dari sebuah kontestan yang ditunjukkan oleh *policy* politik yang ditawarkan.
- d) Peristiwa mutakhir  
Peristiwa mutakhir mengacu pada himpunan peristiwa, isu, dan kebijakan yang berkembang menjelang dan selama kampanye.
- e) Faktor-faktor epidemik  
Isu-isu pemilihan spesifik yang dapat memicu keingintahuan para pemilih mengenai hal-hal baru.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa antara pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, pendekatan rasional dan pendekatan domain kognitif terdapat keterkaitan dan satu sama lain saling melengkapi. Perilaku pemilih seseorang dapat dipengaruhi oleh sikap seseorang yang terbentuk melalui sosialisasi panjang yang dari latar belakang keluarga, ruang lingkup pekerjaan, agama, atau kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal. Sikap seseorang tersebut akan memberikan pemahaman terhadap isu dan kebijakan politik, citra sosial, perasaan emosional, citra kandidat, peristiwa mutakhir dan personal, serta faktor epidemik.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut peneliti berdasarkan konsep perilaku pemilih adalah aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (*to vote or not to vote*) di dalam suatu pemilihan umum, maka dalam penelitian ini dalam menganalisis perilaku pemilih menggunakan teori Surbakti dalam Nursal (2004: 70) untuk melihat perilaku pemilih perilaku pemilih etnis Tionghoa dalam pemilihan Umum Tahun 2014 di Kota Metro. Peneliti menggunakan teori Surbakti karena memiliki relevansi dalam menganalisis pendekatan perilaku pemilih dengan pendekatan domain kognitif.

#### **E. Tinjauan tentang Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum disebut juga dengan "*Political Market*". Artinya bahwa pemilihan umum merupakan pasar politik tempat individu maupun masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik atau kontestan politik) dengan pemilih

(rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik dan sebagainya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai atau kontestan politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif (Kristiadi, 2006: 62).

Pemilu merupakan cara terkuat bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam sistem demokrasi perwakilan modern. Sebuah instrument yang di perlukan bagi partisipasi demokrasi. Pemahaman demokrasi secara normatif merupakan suatu kondisi yang secara ideal ingin diselenggarakan oleh suatu negara. Sedangkan dalam pemahaman demokarasi secara empirik, demokrasi dikaitkan dengan kenyataan penerapan demokrasi dalam tataran kehidupan politik praktis.

Demokrasi sebagai suatu sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat didalam sistem politik, para calon secara bebas bersaing untuk mendapatkan suara, dan hampir semua penduduk dewasa berhak untuk memberikan suaranya. Selain itu, demokrasi juga mensyaratkan adanya kebebasan sipil dan politik, yaitu adanya kebebasan untuk berbicara, berpendapat, berkumpul, berorganisasi, yang dibutuhkan untuk perdebatan politik, dan pelaksanaan kampanye pemilihan umum. Suatu sistem dikatakan tidak demokratis bila oposisi dikontrol dan dihalangi dalam mencapai apa yang dapat dilakukannya, seperti koran-koran oposisi dibredel, hasil

pemungutan suara dimanipulasi atau perhitungan suara tidak benar (Hutington, 2010: 47).

Pelaksanaan Pemilu 2014 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana disebutkan:

- a) Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- c) Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
  - 1) Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
  - 2) Tahapan penyelenggaraan Pemilu.
  - 3) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat upaya konstitusional untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis. Agar pemilu dapat berjalan secara damai, terbuka, dan bebas, diperlukan sebuah sistem pemilu yang disepakati bersama. Sistem pemilu dalam ilmu politik dipahami sebagai kumpulan metode atau cara warga masyarakat tak terkecuali etnis Tionghoa memilih para wakil mereka, bahkan mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Masyarakat Kecamatan Metro Pusat berhak memilih para wakilnya baik dilembaga legislatif (DPR, DPD, DPRD) maupun jabatan politik eksekutif (Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota) dengan tidak memandang pada suatu klasifikasi apapun.

## **F. Tinjauan tentang Partisipasi Politik Etnis Tionghoa**

Popoularitas istilah tionghoa berhubungan dengan bangkitnya nasionalisme pada akhir abad ke-19, Zhonghua digunakan beberapa abad sebelumnya, sebagai sinonim Zhongguo (Tiongkok dalam lafal Hokkian). Untuk menyebut darat pusat Tiongkok. Mencermati perjalanan sejarah Etnis Tionghoa di Indonesia, istilah Tionghoa muncul ketika terjadi perdebatan siapa orang Cina yang menjadi WNI dan siapa yang setia kepada RRC. Istilah Tionghoa muncul untuk membedakan keturunan Cina yang memilih WNI, bukan orang Cina yang memilih menjadi warga negara RRC. Dengan demikian, istilah Etnis Tionghoa digunakan untuk menunjuk orang Cina atau keturunan Cina yang ada di Indonesia, yang memilih menjadi warga negara Indonesia. Istilah Tionghoa menjadi semakin menguat dan meluas penggunaannya Pasca-Orde Baru (Maryanah, 2005: 19).

Sejarah partisipasi politik etnis Tionghoa sendiri dari masa ke masa yang kita telah pahami bahwa dari masa Orde Lama menuju Orde Baru sampai di era reformasi saat ini pun terjadi berbagai macam perubahan. Perubahan politik dari masa Orde Lama sampai era reformasi sekarang pun juga diikuti nya perubahan partisipasi politik etnis tionghoa ditiap jamannya ataupun ditipa massa nya.

Khusus di Provinsi Lampung tepatnya di Kota Metro partisipasi etnis Tionghoa sebelum pemilihan anggota legislatif, dicontohkan Pemilihan Walikota Metro 2010, etnis Tionghoa berpartisipasi hanya sebatas pengamat saja tanpa turut serta dalam pesta demokrasi masyarakat Kota Metro. Etnis

Tionghoa terlihat kurang tertarik karena mereka menganggap bahwa etnis Tionghoa tidak akan pernah bisa menjadi seorang pemimpin di Indonesia. Selain itu membicarakan politik, dan juga mengikuti perkembangan politik ataupun semacamnya, dan apabila pemilu itu dimulai mereka hanya sebatas ikut serta memberikan suaranya di pemilihan kepala daerah tersebut, bahkan sebagian *golput*.

Pemilihan Walikota Metro pada Juni 2010 dalam daftar calon walikota dan wakil walikota tidak ada yang berdarah etnis Tionghoa, maka dari itu peneliti menyebutkan partisipasi etnis Tionghoa sebelum pemilihan Walikota 2010 hanya sebatas pengamat saja. Pada masa orde lama etnis Tionghoa partisipasinya sedikit terlihat dikarenakan di masa itu ada lembaga atau badan yang berhasil didirikan oleh etnis Tionghoa yang diberi nama Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki). Namun hal ini memudar bersamaan dengan bergantinya masa orde lama menuju Orde Baru yang dapat diketahui semua aktifitas etnis Tionghoa khususnya di bidang politik dapat dikatakan mati. Hal ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah pada saat itu untuk menutup semua akses warga etnis Tionghoa dalam ikut berpartisipasi dalam hal politik dan dipercaya hanya dalam dunia perdagangan, bisnis, atau kesehatan saja.

Perkembangan yang ada di saat orde baru di Tahun 1998 yang akhirnya runtuh yang kemudian lahir era reformasi, dimana pada era ini partisipasi politik etnis Tionghoa juga ikut berubah, namun yang membedakan di era reformasi ini partisipasi etnis Tionghoa tidak hanya di bidang politik saja melainkan

perayaan kepercayaan yang mereka yakini serta pengakuan adat istiadat oleh pemerintah pada saat itu dengan menetapkan hari raya Imlek sebagai hari libur nasional.

Perubahan iklim politik di Indonesia dari jaman ke jaman pun ikut merubah bagaimana bentuk partisipasi etnis Tionghoa itu sendiri khususnya di Indonesia sampai saat ini. Hal tersebut juga dengan seiring berjalannya waktu pasti menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia baik itu di tingkat provinsi, maupun kabupaten dan kota yang ada di seluruh Indonesia, yang dimaksudkan disini adalah Kota Metro, sebagai salah satu Kotamadya yang ada di Provinsi Lampung.

Pemilihan anggota legislatif di Kota Metro etnis Tionghoa masih ragu dan bimbang untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi yang berlangsung lima tahun sekali, selain dihindangi trauma setelah pemboikotan yang terjadi pada era orde baru, etnis Tionghoa yang maju dalam pemilihan anggota legislatif periode 2014-2019 yang berlangsung pada 9 April 2014 lalu merasa kurang mendapat sambutan hangat dari masyarakat pribumi atau non-Tionghoa. Masyarakat non-Tionghoa yang mampu mendengarkan serta menyalurkan aspirasi etnis Tionghoa serta berperan aktif dengan cara maju mewakili etnis Tionghoa dalam pemilihan legislatif tahun 2014 di Kota Metro.

Peneliti bermaksud melakukan penelitian terhadap perilaku pemilih masyarakat Kecamatan Metro Pusat dalam pemilihan legislatif Kota Metro. Dalam penelitian ini menganalisis perilaku pemilih etnisistas dalam pemilihan

anggota legislatif Tahun 2014 menggunakan teori Surbakti untuk melihat perilaku pemilih perilaku pemilih etnis Tionghoa dalam pemilihan Umum Tahun 2014 di Kota Metro. Peneliti menggunakan teori Surbakti karena memiliki relevansi dalam menganalisis pendekatan perilaku pemilih yang meliputi pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, pendekatan rasional dan pendekatan domain kognitif.

### **G. Kerangka Pikir**

Pemilih merupakan komponen penting dalam pemilihan umum dan berhak memilih siapa yang akan mewakili kontestan di kursi parlemen. Perilaku pemilih juga sarat dengan *ideology* antara pemilih dengan partai politik atau kontestan pemilu. Masing-masing kontestan membawa ideologi yang saling berinteraksi. Menurut teori Surbakti dalam Nursal (2004: 22) ada beberapa pendekatan untuk melihat perilaku pemilih, yaitu:

- 1) Pendekatan sosiologis.
- 2) Pendekatan Psikologis.
- 3) Pendekatan Rasional.
- 4) Pendekatan Domain Kognitif.

Berdasarkan beberapa rumusan pendekatan untuk melihat perilaku pemilih dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pendekatan yang dirumuskan oleh Surbakti dalam konsep perilaku pemilih adalah aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (*to vote or not to vote*) di dalam suatu pemilihan umum, maka dalam penelitian ini dalam menganalisis perilaku pemilih

menggunakan teori Surbakti untuk melihat Perilaku Pemilih Etnis Tionghoa dalam pemilihan Umum Tahun 2014 di Kota Metro. Peneliti menggunakan teori Surbakti karena memiliki relevansi dalam menganalisis pendekatan perilaku pemilih dengan pendekatan domain kognitif. Perilaku pemilih dalam pendekatan domain kognitif dipengaruhi oleh beberapa indikator, sebagai berikut:

- a) Isu dan kebijakan publik (*issues and policies*).
- b) Citra sosial (*social imagery*).
- c) Perasaan emosional (*emotional feelings*).
- d) Peristiwa mutakhir (*currents events*).
- e) Faktor epidemik (*episdemic issues*).

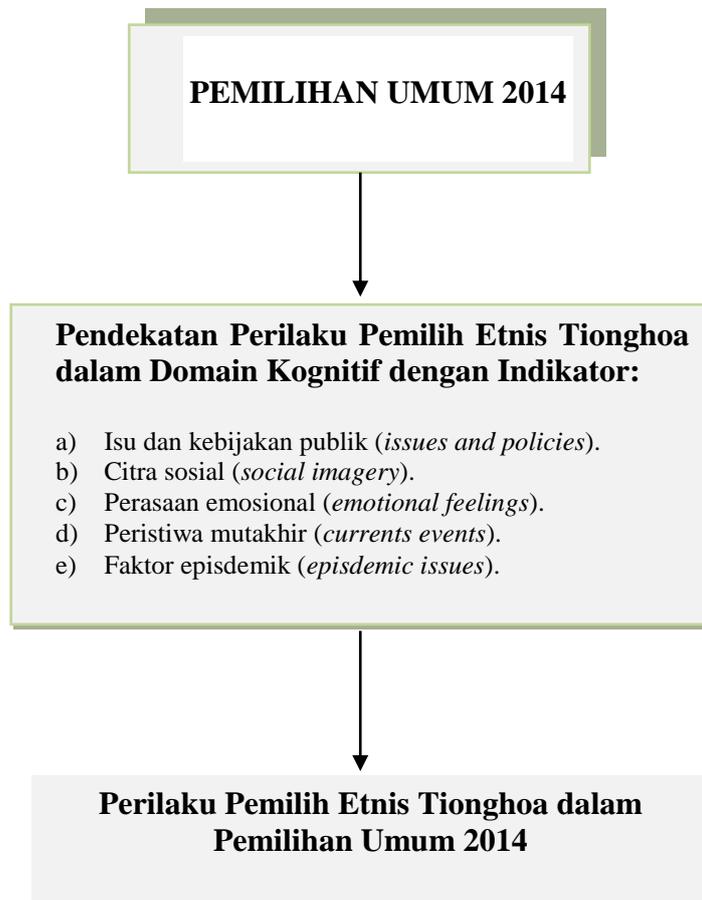
Secara teoritis relevansi dalam menganalisis pendekatan perilaku pemilih dengan pendekatan domain kognitif melihat bahwa melihat perilaku pemilih etnis Tionghoa merupakan interaksi antara aktor-aktor politik baik masyarakat, pemerintah dan lembaga dalam proses politik, paling tidak dalam proses politik ada pihak yang memerintah, menentang dan menaati serta mempengaruhi dalam proses politik, baik dalam pembuatan, pelaksanaan dan penegakkan kebijakan. Konsep tersebut menunjukkan, perilaku pemilih etnis Tionghoa merupakan interaksi atau hubungan diantara para aktor-aktor politik baik masyarakat, pemerintah dan lembaga dalam proses politik, baik itu dalam Pemilihan Umum presiden dan wakil presiden, Pemilihan Gubernur, Walikota, Anggota Legislatif dan sebagainya.

Pendekatan domain kognitif yang digunakan dalam penelitian ini memiliki indikator yang saling menguatkan atau melengkapi, untuk memudahkan kepentingan praktis maka indikator dalam pendekatan tersebut, dapat disederhanakan menjadi sebuah rangkuman tentang Perilaku Pemilih Etnis Tionghoa dalam pemilihan Umum Tahun 2014 di Kota Metro yaitu (1) Isu dan kebijakan publik, (2) Citra sosial, (3) Perasaan emosional, (4) Peristiwa mutakhir dan (5) faktor epidemik.

Kelompok etnis Tionghoa sebagai suatu populasi yang secara biologis mampu berkembang dan bertahan di Kota Metro mempunyai nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya serta menentukan cirri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok masyarakat mayoritas lain.

Berdasarkan pendekatan domain kognitif maka dapat diketahui bahwa etnis Tionghoa di Kota Metro merupakan suatu kelompok sosial yang mempunyai tradisi kebudayaan dan sejarah yang sama, dan karena kesamaan itulah mereka memiliki suatu identitas sebagai suatu subkelompok dalam suatu masyarakat yang luas. Etnis Tionghoa di Kota Metro juga merupakan suatu kelompok individu yang memiliki kebudayaan yang berbeda, namun diantara para anggotanya merasa memiliki semacam subkultur yang sama dan merupakan suatu kelompok yang memiliki domain tertentu, yang disebut dengan *ethnic domain*.

Pendekatan domain kognitif dalam penelitian ini melihat perilaku pemilih etnis Tionghoa dalam pemilihan Umum Tahun 2014 di Kota Metro terhadap beberapa indikator yakni isu dan kebijakan publik, citra sosial, perasaan emosional, peristiwa mutakhir dan faktor epidemik yang digunakan peneliti sebagaimana dapat digambarkan pada bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir